

BAB I
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Sistem negara yang demokrasi¹ di Indonesia memberikan kesempatan yang baik bagi perkembangan perpolitikan bangsa. Salah satu cara untuk mengukur sejauh mana sistem politik yang demokratis² itu berhasil, dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah melalui keterlibatan warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) atau-pun pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, demokrasi³ juga dijadikan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraannya.

¹ Demokrasi merupakan salah satu sistem yang banyak dipakai oleh beberapa negara di belahan dunia. Pengertian mengenai demokrasi telah banyak disampaikan oleh para tokoh-tokoh terkemuka diantaranya yang dianggap paling populer yaitu Abraham Lincoln dikemukakan pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*). Tidak hanya itu Menurut Harris Soche, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. (Kabul Budiyo 2012)

² Untuk menilai apakah suatu sistem politik itu demokratis atau non demokratis, ilmuwan pada umumnya menjabarkan elemen-elemen kritis yang terkandung dalam frasa pemerintahan oleh rakyat, selain melihat perwujudan elemen-elemen demokrasi pada level empirik. Jika dikaji lebih dalam frasa “pemerintahan oleh rakyat” ternyata akan menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis yaitu siapa rakyat yang memerintah, bagaimana rakyat memerintah, seberapa besar rakyat terlibat. Sejumlah pertanyaan ini menyebabkan demokrasi tidak bermakna tunggal tetapi merupakan entitas dinamis yang memperoleh pemaknaan (interpretasi) berbeda-beda dari para ilmuwan politik. Lebih lanjut Rujuk Tengku Rika Valentina, 2017. *Proses Konsolidasi Demokrasi Pada narag di Sumatera barat. Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung.*

³ Leo Agustino (2007) memberikan definisi umum dari demokrasi yaitu : secara garis besar dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung dan tidak langsung, amat ditentukan oleh suara terbanyak dari warga masyarakat yang memiliki hak memilih dan dipilih, melalui wadah pembentukan suara dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan.

Sebagai bentuk perwujudan demokrasi di daerah dan menjadi salah satu ukuran tingkat partisipasi politik⁴ masyarakat daerah, pemilihan umum kepala daerah menjadi momentum yang menentukan proses demokrasi di daerah tersebut. Pilkada merupakan kontestasi politik yang sangat-sangat ditunggu oleh elit ataupun masyarakat untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ditinjau jauh kebelakang terkait segala ketentuan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatakan bahwa, pemilihan kepala daerah adalah sebuah ajang demokrasi dalam rangka mencari pemimpin yang sah. Pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit dan kehendak publik.⁵ Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakkan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya, layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga derajat akuntabilitas dan kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan baik. Apalagi pilkada merupakan instrumen penting bagi demokratisasi di level lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional. Dalam

⁴ Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup seperti kegiatan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau parlemen dan sebagainya (Miriam Budiardjo. 1998 dalam *Partisipasi dan Partai Politik*). Pada pilkada Kota Padang Tahun 2018, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat di Kota Padang, ini ditandai dengan naiknya persentasi jumlah pemilih, dari data KPU Kota Padang bahwasanya, persentasi jumlah pemilih mencapai angka 64,05%. Hal tersebut jauh lebih tinggi dari pada Pilkada sebelumnya pada 2013 dengan 10 pasangan calon partisipasi pemilih hanya 57,7%.

pelaksanaannya sendiri sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 Tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

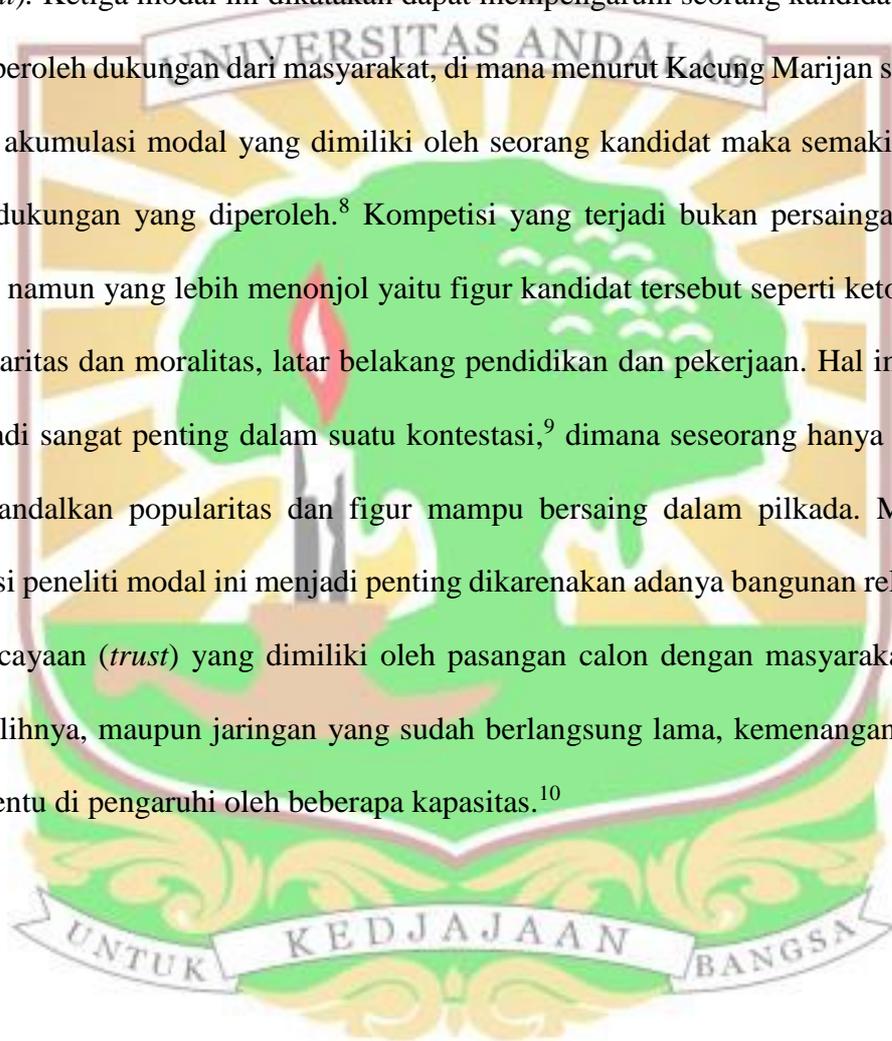
Berdasarkan peraturan per Undang-Undangan tersebut Pilkada menjadi ajang kontestasi politik yang setiap 5 tahun sekali diadakan untuk pergantian para pemimpin daerah. Pilkada diharapkan mampu sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menyampaikan suaranya dalam memilih pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Melalui pemilihan secara langsung ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan dan pembangunan daerah yang lebih baik.

Jika melihat dan mencermati secara seksama prosedur atau proses dalam Pilkada secara langsung, menurut penjelasan Stella Pantouw secara metaforanya kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil, mengapa demikian? jika pasangan calon ingin memenangkan kontestasi Pilkada maka calon harus mempunyai tiga kombinasi dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai.⁷ Secara konseptual menurut Pantouw metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pilkada yaitu (1) modal politik (*political capital*) (2) modal sosial (*social capital*) dan (3) modal ekonomi (*economical*

⁶ Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 3 Ayat 1

⁷ Stella Maria Ignasia Pantouw. 2012. Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi Tentang Modalitas Dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh Dan Maximiliaan Lomban Pada Pilukada Di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010). *Thesis*. Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro, hlm 3

capital). Ketiga modal ini dikatakan dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat, di mana menurut Kacung Marijan semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.⁸ Kompetisi yang terjadi bukan persaingan antar partai namun yang lebih menonjol yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi,⁹ dimana seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figur mampu bersaing dalam pilkada. Menurut asumsi peneliti modal ini menjadi penting dikarenakan adanya bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya, maupun jaringan yang sudah berlangsung lama, kemenangan calon-pun tentu di pengaruhi oleh beberapa kapasitas.¹⁰



⁸ Marijan Kacung, 2006, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya, hlm 89

⁹ Dalam Kamus Merriam-Websters, *contestation* bermakna controversy dan debate. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) pun sejalan dengan hal itu, yaitu kata kontestasi bermakna kontroversi atau perdebatan. Sistem untuk memperebutkan dukungan rakyat telah mengikuti 'sistem pasar' seiring dengan rontoknya sistem lama oleh gerakan reformasi pada 1998. Dengan demikian, berdasarkan kedua pengertian tersebut, jelas sekali bahwa kata kontestasi tidak punya hubungan makna dengan kata persaingan, kontes, dan kompetisi.

¹⁰ Kapasitas yang dimaksudkan tentu tidak hanya dari partai pengusung saja, akan tetapi juga dilihat dari modal yang mereka miliki. Apakah itu modal ekonomi, modal sosial, modal politik atau modal yang dirasa perlu untuk menunjang para calon. Dari ketiga modal yaitu modal politik, modal ekonomi dan modal sosial, dalam Pilkada modal sosial menjadi penting maknanya tanpa juga mengesampingkan modal lainnya, mengapa demikian mempunyai modal sosial tidak hanya dikenal oleh para pemilih melainkan adanya pengenalan-pengenalan baik secara fisik dan sosial secara dekat. Pemilih pun bisa menilai apakah calon tersebut layak dipilih atau tidak. Modal sosial ini akan menentukan sejauh mana calon tidak hanya dikenal oleh masyarakat atau para pemilih melainkan juga diberikan kepercayaan.

Dilatarbelakangi hal tersebut pada pilkada serentak Tahun 2018 terdapat 171 daerah yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota, serta 115 Kabupaten,¹¹ Kota Padang merupakan satu dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2018.¹² Kota Padang ibu kota dari Provinsi Sumatra Barat ini, telah pernah melaksanakan sebanyak empat kali pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan Pilkada oleh Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang, menetapkan 2 pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi politik pada Pilkada serentak Tahun 2018, yang terdapat dalam tabel berikut;

Tabel 1.1
Daftar Pasangan Calon Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon		Partai Pengusung
	Walikota	Wakil Walikota	
1	Emzalmi	Desri Ayunda	Golkar, Nasdem, PDI-P, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PBB, Perindo
2	Mahyeldi Ansyarullah	Hendri Septa	PKS, PAN

Sumber: KPU Kota Padang Tahun 2018

¹¹ Lihat Pilkada Serentak Tahun 2018 akan diikuti 171 daerah, Diakses (kpud-madinakab.go.id,) Pada Tanggal 9 Agustus 2018 Pukul 16:20

¹² Untuk wilayah Sumatra barat terdapat empat daerah yang mengikuti Pilkada serentak Tahun 2018 diantaranya yaitu 1. Kota Padang (Pemilihan Umum Wali Kota Padang), 2. Kota Padang Panjang (Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang), 3. Kota Pariaman (Pemilihan Umum Wali Kota Pariaman) 4. Kota Sawahlunto (Pemilihan Umum Wali Kota Sawahlunto)



Pada Tabel 1.1 Terdapat dua pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada serentak di Kota Padang Tahun 2018 yaitu : (a) Pasangan Emzalmi¹³ dan Desri Ayunda¹⁴ dengan No urut 1. (b) Pasangan Mahyeldi Ansyarullah¹⁵ dan Hendri Septa¹⁶ dengan No urut 2. Dari tabel 1.1 tersebut terlihat arena kontestasi yang

¹³ Ir. H. Emzalmi, M.Si (akrab dipanggil Emzalmi) lahir di [Padang, Sumatera Barat, 28 September 1952](#) dan menghabiskan masa kecilnya di [Kota Padang](#). Emzalmi memulai karir sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) Dinas Pekerjaan Umum [Lubuk Sikaping, Pasaman](#). Karena dinilai sukses dalam karir sebelumnya Emzalmi dipromosikan menjadi Kepala Dinas Tata Kota [Solok](#) (1985-1991), Kepala Dinas Pekerjaan Umum [Kota Bukittinggi](#) (1991-1994), dan Kepala Dinas Tata Kota [Padang](#) (1994-1998). Setelah bertahun-tahun diangkat sebagai kepala dinas, ia diangkat sebagai Asisten II Sekda Kota Padang (1998-2001). Setelah itu, ia ditempatkan pada posisi Kepala Bappeda Kota Padang (2001-2009) dan akhirnya mengakhiri karier birokrat sebagai Staf Ahli [Wali Kota Padang](#) merangkap Sekretaris Daerah Kota Padang (2009-2012). Emzalmi mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Padang dalam [pemilihan umum Wali Kota Padang](#) yang digelar pada 30 Oktober 2013. Diikuti 10 pasang calon, Emzalmi mendampingi [Mahyeldi Ansharullah](#) menang atas 29,45% suara. Setelah menjalani putaran kedua pada 5 Maret 2014, mereka kembali unggul dengan perolehan 50,29% suara, dan menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang periode 2013-2018.

¹⁴ H. Desri Ayunda, SE, MBA merupakan orang asli Koto Tangah dari kaum suku Guci, lahir di Padang 24 Oktober 1961. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Andalas, merupakan mahasiswa yang aktif berorganisasi, setelah menamatkan kuliah ia bekerja di PT. Semen Padang hingga menduduki posisi Sekretaris Perusahaan, sebuah posisi strategis. Ia berkarir sejak dari bawah hingga kemudian di percaya menjadi Direktur Utama dan Komisaris Utama sejumlah anak perusahaan dilingkungan perusahaan semen tertua di Asia Tenggara itu. Perjalanannya di dunia Politik pertama kali ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang bersama Prof. James Hellyward di Pilkada Kota Padang Tahun 2013, pasangan ini kalah tipis dengan menjalani 2 putaran dengan pasangan calon Mahyeldi Ansyarullah dan Emzalmi. Pada Pilkada serentak Kota Padang Desri mencalon kembali sebagai Wakil Wali Kota Padang menemani Emzalmi yang merupakan lawannya pada saat Pilkada sebelumnya. Pasangan ini tampak serasi dengan membawa nama putra daerah karena sama sama asli orang Padang.

¹⁵ H. Mahyeldi Ansharullah, [SP](#) (akrab dipanggil Mahyeldi) lahir di [Bukittinggi, Sumatera Barat](#) pada [25 Desember 1966](#) kerap dijuluki politisi dari [Partai Keadilan Sejahtera](#) dan mubalig. Perjalanan Mahyeldi dalam pemerintahan cukup panjang dimulai pada pemilihan umum legislatif 2004, Mahyeldi diusung oleh PKS sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Sumatera Barat. Pada saat yang sama, Mahyeldi adalah Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Barat sejak 2002 sampai tahun 2005. Hasil perolehan suara menempatkan PKS sebagai pemenang di Padang. Mahyeldi duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009, tetapi mengundurkan diri setelah memutuskan maju sebagai Wakil Wali Kota Padang pada tahun 2008. Pada tahun 2014 pemilihan umum Wali Kota Padang pertama 2008, Mahyeldi terpilih sebagai Wakil Wali Kota mendampingi Fauzi Bahar. Mahyeldi mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Padang dalam pemilihan umum Wali Kota Padang yang digelar pada 30 Oktober 2013, dan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Kota Padang dengan Emzalmi sebagai Wakil Wali Kota Padang periode 2013-2018.

¹⁶ Hendri Septa, B. Bus. (Acc), MIB putra dari Muhammad Asli Chaidir ini akrab dipanggil Hendri lahir di Padang, Sumatera Barat, 6 September 1976. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas di [SMA Negeri 2 Padang](#), Hendri melanjutkan pendidikan di Universitas

sangat kuat pada Pilkada Kota Padang yang lalu. Salah satunya dukungan politik dari 10 partai yang berkoalisi pada pasangan calon No urut 1 (Emzalmi-Desri ayunda) diantaranya Golkar, Nasdem, PDI-P, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PBB, Perindo. Berbeda dengan pasangan dengan No urut 2 Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa hanya didukung oleh 2 partai saja yaitu PKS dan PAN. Sama-sama diketahui kedua pasangan calon Walikota ini (Mahyeldi dan Emzalmi) merupakan petahana yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang pada periode tahun sebelumnya. Kedua pasangan ini memperlihatkan kemampuan mereka untuk mampu lebih baik memimpin Kota Padang kedepannya, terdapat perbandingan cukup jauh terhadap jumlah dukungan partai dari kedua belah pihak, akan tetapi ini cenderung tidak mempengaruhi kemenangan dari pihak Mahyeldi-Hendri yang berhasil memenduduki jabatan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang pada periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Swinburne, [Melbourne](#), setara Diploma III dengan gelar *Advanced Diploma Business in Accounting*. Hendri melanjutkan pendidikan ke [Universitas Monash](#) di Melbourne selama tiga tahun, kemudian pindah ke Universitas Central Queensland, sampai menamatkan pendidikan setara Strata 1 dengan gelar *Bachelor of Business (Accounting)* atau disingkat BBus (Acc). Setelah itu, untuk mematangkan lagi ilmunya di bidang bisnis, Hendri kuliah Strata 2 di Universitas Deakin, hingga tamat dengan gelar *Masters of International Business* (MIB). Karirnya dalam dunia politik diawali menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN [Kota Padang](#) sejak 13 November 2016. Sebelumnya, pernah berkursi sebagai Anggota [DPRD Kota Padang](#) periode 2009–2014. pada [Pemilu 2014](#), Hendri kembali mencalonkan diri sebagai anggota [DPRD Sumatera Barat](#). Suara yang diperoleh Hendri tidak mencukupi untuk duduk di gedung perwakilan rakyat di [Jalan Khatib Sulaiman](#) itu.



Tabel 1.2
Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018

No Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	Ir. H . Emzalmi, M.Si dan H. Desri Ayunda SE. MBA	125.238	37.08 %
2	H. Mahyeldi SP dan Hendri Septa B. BUS (Acc). MIB	212.526	62.92 %

Sumber: dari KPU.go.id Tahun 2018

Perolehan suara yang signifikan terlihat pada Tabel 1.2 menunjukkan secara jelas bahwa pasangan Mahyeldi-Hendri memperoleh suara lebih banyak sehingga menang telat dengan jumlah suara 62,92 persen atau 212.526 suara, sementara itu pasangan Emzalmi-Desri Ayunda memperoleh 37,08 persen atau 125.238 suara.

Dari beberapa penjelasan diatas, peneliti melihat bahwasannya modal sangat diperlukan dalam sebuah kontestasi politik bagi seorang calon yang akan bertarung. Akan tetapi untuk saat ini modal sosial menjadi salah satu bagian modal yang dapat memperkuat elektabilitas calon untuk melenggang ke kursi pemerintahan. Modal sosial penting bagi individu sehingga mampu menjaring suara, menjaring kepercayaan agar masyarakat memberikan haknya kepada orang yang telah dipercayainya untuk duduk mewakili suara rakyat di pemerintahan.

Maka dari itu pandangan peneliti bahwasanya adanya modal sosial seperti figur Mahyeldi yang adalah petahana yang berhasil melaksanakan beberapa tugasnya yang sampai saat ini disebut-sebut oleh masyarakat yaitu penataan pasar raya, pantai padang serta figur nya yang cenderung religius banyak berkumpul dengan ibu-ibu pengajian, seperti majelis taklim dan tablig akbar yang ia lakukan. Ini

merupakan suatu bentuk habit yang dimiliki Mahyeldi untuk mampu bertarung pada arena Pilkada. Dari latar belakang tersebut mengajak peneliti untuk melihat adanya modal sosial yang di bangun atau yang dimanfaatkan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah yaitu Mahyeldi-Hendri untuk mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, yang diyakini membawa mereka maju untuk duduk sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya menarik peneliti untuk menelisik beberapa data yang kemudian membantu peneliti untuk merumuskan permasalahan, di antaranya beberapa berita seperti yang dilansir dari (antaranews Sumbar) Sepuluh partai memberikan dukungan kepada pasangan Emzalmi-Desri Ayunda, untuk maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024. Hal ini merupakan posisi yang menguntungkan bagi Emzalmi-Desri untuk meraih beberapa suara dari pendukung partai, tidak hanya itu baik dari beberapa lembaga adat seperti KAN dan tokoh niniak mamak se- Kota Padang mendukung Emzalmi-Desri.

“Sepuluh partai mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Emzalmi sebagai Wako, dan Desri Ayunda sebagai Wawako Padang, kami akan bahu-membahu untuk memenangkan,” kata Ketua Tim Pemenangan dari Partai Golkar Wahyu Iramana Putra, usai deklarasi di Padang”.¹⁷

Wahyu juga merinci menyebutkan nama-nama partai yang ikut mendukung yaitu selain golkar partai lain yang memberi dukungan adalah Nasdem, PDI-P, Gerindra,

¹⁷ Dikutip dari antaranews.com, *Emzalmi-Desri Ayunda Didukung Sepuluh Partai Maju Pilkada Padang* Diakses Pada Tanggal 18 September 2018 di (<https://sumbar.antaranews.com>)

Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PBB, dan Perindo. Seperti yang diulas pada latar belakang, dukungan tidak hanya berasal dari partai politik saja, melainkan dukungan dari niniak mamak serta lembaga adat lainnya. Hal Ini dikarenakan keduanya merupakan putra daerah asli Kota Padang. Dibuktikan dengan pemberitaan sumbar.com yang mengatakan bahwa:

“Kami menyerahkan anak kemenakan kami, Emzalmi-Desri Ayunda kepada partai politik yang mengusung mereka di Pilkada Kota Padang,” ujar Syofyan Datuk Bijo, dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tengah, didampingi ninik mamak lainnya.” Ia juga mengatakan “Pagi ini, semua ninik mamak dari 10 Nagari yang ada di Kota Padang hadir. Besar harapan kami, kita betul-betul bersatu, berjuang dan memenangkan pasangan Emzalmi-Desri Ayunda ini,” tukuknya.¹⁸

Banyak dukungan dari berbagai kalangan didapatkan oleh pihak Emzalmi-Desri (pasangan calon yang kalah) pada saat Pilkada 2018. Melihat beberapa kemungkinan perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Emzalmi-Desri cukup besar pada Pilkada tahun ini, sedangkan pasangan Mahyeldi-Hendri hanya didukung oleh dua partai saja yaitu PKS dan PAN. Ini mungkin salah satu modal politik yang lemah dikarenakan sedikitnya partai yang berkoalisi dari pasangan Mahyeldi-Hendri terlebih tidak banyak pula dukungan dari niniak mamak atau lembaga adat tepatnya di Kota Padang. Hal ini terjadi dikarenakan Mahyeldi tidak putra daerah maka dukungan tersebut lebih berpihak kepada Emzalmi yang asli putra daerah Kota Padang.

¹⁸ Dikutip dari sumbartoday.com, *Ninik Mamak Kota Padang Serahkan Emzalmi-Desri Ayunda Ke Partai Politik*. Diakses Pada Tanggal 18 September 2018 di (<https://www.bentengsumbar.com>)

Data tersebut membuat peneliti berasumsi terdapat modal sosial yang dimanfaatkan dan dibangun oleh pasangan Mahyeldi-Hendri. Terlihat dari figur Mahyeldi yang merupakan Walikota periode sebelumnya, sehingga dirinya tidak asing lagi bagi masyarakat Kota Padang pada umumnya. Beberapa keberhasilan pembangunan di Kota Padang membuat masyarakat berfikir mempertimbangkan Mahyeldi untuk duduk kembali menjadi Walikota. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Kota Padang terlihat sebagai berikut :

“Mahyeldi pemimpin yang rancak untuk Kota Padang, alah nampak hasilnya, mulai dari pantai Padang dan pasar raya yang alah barasiah dan tertata dengan elok. Pembangunan jaleh dan kota padang aman-aman sajo. Takah untuk dijadikan pamimpin baliak, dan sifat pamimpin seperti mahyeldi yang baik mamimpin kota Padang”¹⁹afridawati (46th)

(Mahyeldi pemimpin yang baik untuk Kota Padang, hasilnya sudah terlihat mulai dari pantai padang dan pasar raya yang sudah bersih dan tertata dengan baik. Pembangunan jelas dan keamanan baik-baik saja, Bisa diteruskan untuk dijadikan pemimpin lagi dan sifat pemimpin Mahyeldi yang sesuai untuk memimpin Kota Padang kedepannya.)

Dari hasil wawancara dengan warga Mahyeldi terpendang baik menjadi seorang pemimpin di Kota Padang periode sebelumnya, sifat Mahyeldi yang ramah dan perhatian kepada masyarakat serta pembangunan Kota menjadi modal untuk Mahyeldi kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Padang. Hal ini juga mengundang dukungan dari berbagai pihak lainnya seperti dikutip dari Tempo.com Padang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, “Mahyeldi merupakan sosok pemimpin yang rendah hati, politikus PKS itu juga dikenal pekerja keras. Jika harus berhadapan (dengan Mahyeldi) kami juga bingung," ujarnya, Senin

¹⁹ Wawancara dengan warga Afridawati, (46 Tahun) Padang, Mei 2018

malam, 11 Desember 2017.²⁰ Zulkifli optimistis pasangan Mahyeldi-Hendri akan bisa memenangi [Pilkada 2018](#) nanti. Apalagi, banyak prestasi yang telah ditorehkan Mahyeldi selama periode sebelumnya. Beberapa pujian ini tentu membuat dukungan kepada mahyeldi semakin bertambah dikarenakan prestasi kerjanya selama satu periode belakang.

Dilihat dari beberapa pemberitaan terkait kemenangan-kemenangan Mahyeldi-Hendri, dikutip dari sumbarantaranews.com pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal, menilai kemenangan pasangan calon Walikota Padang Mahyeldi-Hendri sudah diprediksi sejak awal. Edi menyampaikan faktor yang paling banyak menentukan kemenangannya pada Pilkada adaah figur Mahyeldi sebagai Walikota petahana.²¹

²⁰ Dikutip dari tempo.com, Dukungan Partai PKS Dan PAN Terhadap Mahyeldi Ansyarullah, diakses pada tanggal 25 september 2018 diakses di (<https://www.tempo.com>)

²¹ Terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 yang berisi penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan kian menjadi polemik. Surat edaran yang menjabarkan definisi "petahana" menurut KPU tersebut justru menimbulkan perdebatan mengenai definisi petahana itu sendiri. Didalam KBBI dari edisi I sampai edisi ke IV belum ditemukan arti atau defenisi kata "petahana". Sebab, kata ini memang berasal dari "tahana" yang bermakna "kedudukan, martabat (kebesaran, kemuliaan, dan sebagainya)". Dalam kata kerja, maka muncul kata "bertahana" yang memiliki arti "bersemayam; duduk". Oleh sebab itu, di dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, baik DPR maupun pemerintah membuat penjabaran mengenai makna petahana, terutama di dalam pasal yang menyangkut konflik kepentingan. Di dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada disebutkan bahwa setiap pasangan calon kepala daerah yang ingin maju saat pilkada tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Sementara, itu yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Surat edaran yang diterbitkan KPU tersebut hanya menjabarkan apa yang terdapat di dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan. Sebab, di dalam Peraturan KPU yang sebelumnya telah disepakati antara pemerintah dan DPR itu tidak dijabarkan secara rinci arti petahana. Pasal 1 ayat 19 PKPU itu menyatakan, petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

“Mahyeldi menuai insentif politik yang lebih besar terlihat dari tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi atas perubahan pembangunan dalam empat tahun terakhir”²² ujarnya.

Tidak hanya itu, masyarakat dapat menilai ketika melihat baliho kedua pasangan calon seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Baliho Kedua Pasangan Calon Pada Pilkada Kota Padang Tahun 2018



Sumber: dari goggle.com

Ketika pihak dari Emzalmi-Desri menonjolkan latar belakang keahlian mereka dengan Emzalmi adalah seorang Birokrat yang tegas dan mampu mengayomi masyarakat serta melaksanakan tugas nya secara terstruktur. Dan sebaliknya Desri Ayunda yang merupakan pengusaha professional yang memiliki jiwa-jiwa *entrepreneur* dengan semangat kepemudaan nya mampu hendak nya mempengaruhi pemuda-pemudi Kota Padang. Hal ini juga merupakan bentuk modal yang dibangun oleh pihak Emzalmi-Desri untuk memperlihatkan keahlian

²² Dikutip dari antaranews.com. *Kemenangan Mahyeldi-Hendri Telah Diprediksi Sejak Awal, Kata Pengamat.* Diakses pada tanggal 12 November 2018 Pukul 14.30 di (<https://sumbar.antaranews.com>)

mereka. Akan tetapi lain hal dengan Pasangan Mahyeldi-Hendri yang tidak mengedepankan latar belakang keahlian mereka atau-pun unsur-unsur penting yang mereka miliki, cukup dengan kata “Lanjutkan” dengan hastag (salam dua periode) telah menjelaskan apa yang akan mereka lakukan kedepannya. Ini salah satu modal sosial yang mereka bangun, untuk menarik perhatian masyarakat dengan kata “Lanjutkan”, masyarakat cenderung melihat bagaimana keberhasilan Mahyeldi pada periode sebelumnya.

Tak terlepas dari itu juga data-data lain yang peneliti coba perlihatkan adalah, ranah yang dimainkan oleh pihak Mahyeldi-Hendri. Bourdieu mengatakan bahwa ranah merupakan; 1) arena kekuatan sebagai upaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan dan, 2) semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa di sadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan.²³ Hal ini terlihat bahwasanya arena merupakan tempat bermainnya seorang aktor. Mahyeldi yang juga dilatarbelakangi sebagai seorang yang agamais, dan penuh perhatian terhadap langkah-langkah membangun karakter masyarakat yang agamais dan cinta Al-Quran. Tidak hanya itu baik dalam Program Kerja pada periode lalu juga menonjolkan prinsip-prinsip ke-agamaan. Sering mengunjungi dan melakukan pengajian bersama Majelis Taklim se-Kota Padang. Melakukan Tablig akbar, komunitas Penghafal dan pecinta Al-Quran dan menghadiri Jumling (Jumat

²³ Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (Terjemahan Nurhadi) (2010). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoder*, Yogyakarta: Kreasi Wacana. Hlm 582

keliling) dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Salah satunya seperti yang peneliti kutip dari salah satu pemberitaan dibawah ini :



Gambar 1.2
Berita Mahyeldi-Hendri Hadiri Pengajian Dengan Majelis Taklim
Ar-Raudah



Sumber: media online babarito.com

Pasangan No. Urut 2 Mahyeldi-Hendri hadir pengajian Ar-Raudah yang terdiri dari Ibu-ibu berbagai kecamatan di Kota Padang, yang dilaksanakan di rumah Asli Khaidir (Anggota DPR RI). Dalam sambutannya Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada masyarakat di setiap kecamatan yang telah membantu program-program pemerintah. Mahyeldi juga menyampaikan “kalau masih ada yang belum tuntas, maka kami siap melanjutkan” ujarnya lanjut.²⁴ Rabu (28/2). Selain itu, dalam sambutannya Mahyeldi menyampaikan merasa siap berkolaborasi dengan Hendri Septa yang merupakan alumni luar negeri. Jejaring Hendri yang berskala internasional akan membuka peluang besar bagi Kota Padang untuk Go International.

Dari pemberitaan diatas, Mahyeldi merasa yakin untuk melanjutkan pemerintahan kedepannya, melalui arena seperti ini-lah Mahyeldi-Hendri meyakini

²⁴ Dikutip dari Babarito.com. *Majelis Taklim: Ucapkan Terima Kasih Atas Kerja Keras Mahyeldi*. Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2018 Pukul 18.01 di (<https://www.babarito.com/2018/02/majelis-taklim-ucapkan-terima-kasih.html>)

masyarakat yang didominasi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan, guna menyampaikan visi-misi untuk Padang yang lebih baik. Berbeda dengan pasangannya yaitu Hendri, yang memainkan modal sosial yang dimiliki dari latar belakang keluarga-nya, baha kita ketahui Hendri merupakan anak dari Muhammad Asli Chaidir yang menjabat sebagai anggota DPR-RI, dan Hendri juga merupakan menantu dari Leonardy Harmainy. Berkecimpung dengan keluarga yang lebih dahulu menjajaki dunia politik tentu ada pembelajaran tersendiri baginya. Tak terlepas dari itu, seperti yang telah di beritakan diatas, dengan latar pendidikan yang menamatkan beberapa study nya diluar negeri tentu menjadi sebuah modal bagi Hendri untuk mampu menjadi lebih dengan jejaring yang luas berskala internasional, seperti yang diungkapkan Mahyeldi pada pemberitaan diatas. Hal ini juga senada dengan kutipan salah satu media online dibawah ini:

“Muda, berpendidikan luar negeri, pengusaha serta anak dari Asli Chaidir dan menantu dari Leonardy Harmainy, politisi yang telah kenyang makan asam-garam perpolitikan di Ranah Minang, ada pada sosok Hendri Septa,” terang Taslim.

“Tak ada kandidat lain untuk Kota Padang, yang memiliki profile seperti Hendri Septa ini. Mari kita segera berkoalisi sehingga kerja-kerja politik yang sistematis dan terukur, bisa segera dimulai,” tukas Taslim.²⁵

Dari beberapa data yang didapati oleh peneliti, dengan pernyataan-pernyataan di atas, peneliti mengansumsikan bahwasanya telah terindikasi bahwa penggunaan atau pemanfaatan modal sosial oleh pasangan Mahyeldi-Hendri untuk meraih suara dari berbagai arena yang mampu mereka rebut untuk berhasil

²⁵ Dikutip dari Valora.Co.Id. *Hendri Disiapkan Untuk Pilkada Kota Padang*. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2018 Pukul 20:12 Di (<http://www.valora.co.id/berita/7831/hendri-septa-disiapkan-untuk-pilkada-padang-taslim-profilenya-nyaris-tanpa-cela.html>)

memenangkan Pilkada Kota Padang Tahun 2018. Hal ini menarik peneliti untuk mencoba menganalisis bagaimana pemanfaatan modal sosial tersebut terhadap kemenangan pasangan tersebut pada Pilkada Tahun 2018 lalu. Hal ini tentu mengacu pada teori atau pisau analisis peneliti untuk mencoba membuktikan secara lebih teoritis terhadap kasus penelitian ini.

Menurut Bourdieu, definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti, namun hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif, penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus,²⁶ modal bersifat langsung, nilai yang diberikan modal, dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus. Ranah dkitari oleh relasi kekuasaan objektif yang memiliki basis material, jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan ke dalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut.

Identitas melekat dalam habitus seorang aktor yang tercermin dari hasil konstruksi terkait pengalaman aktor memaknai realitas yang dihadapinya. Kemenangan yang diraih semata-mata tidak mengandalkan eksistensi partainya

²⁶ Habitus sebagai gagasan, tidaklah diciptakan sendiri oleh Bourdieu, namun merupakan gagasan filosofis tradisional yang ia hidupkan kembali (Warquant, 1989; Ritzer dan Goodman, 2010:581. Dalam tradisi filsafat, habitus diartikan sebagai kebiasaan yang sering disebut dengan *habitual* yakni penampilan diri, yang menampak (*appearance*); tata pembawaan terkait dengan kondisi tipikal tubuh seperti: cara kita makan, berjalan, berbicara, dan bahkan dalam cara kita membuang ingus kita. Menurut Aristoteles, habitus diartikan sebagai katagori yang melengkapi subjek sebagai substansi. Tidak adanya kategori, tidak pula mengubah substansi. Katagori apakah yang melekat pada substansi dan tidak ter-pisahkan? Menurut Aristoteles adalah kualitas rasionalitas dan idealitas.

atau organisasi sosial, melainkan juga kemampuan personal seorang aktor politik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk mendukungnya. Arena politik adalah tempat pertarungan aktor untuk mendapatkan legitimasi ataupun posisi strategis di pemerintahan yang di dalamnya terdapat modal sebagai penunjang tujuan. Modal sosial sebagai pemahaman dan pengetahuan terhadap komunitas atau kelompok sosial yang memiliki hubungan baik untuk melakukan suatu kegiatan produktif. Modal sosial ini berhubungan dengan kepemilikan pada organisasi- organisasi, struktur, dan hubungan-hubungan sosial antara anggota kelompok, terlepas dari intervensi pemerintah atau pihak lain. Modal sosial terbentuk dari kepercayaan tiap individu dalam jaringan sosial sehingga komitmen yang sudah ada hendaknya dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan. Pemanfaatan modal sosial yang dimiliki aktor dalam ranah pertarungan politik memperjelas bahwa hubungan timbal balik antara anggota organisasi dengan masyarakat dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, peneliti mencoba mengelompokkan beberapa kategori utama penelitian terdahulu yang berkaitan dengan modal sosial yaitu (i) melihat hubungan dan keterkaitan antara modal sosial dengan ketidakpercayaan politik, partisipasi politik dan kecenderungan politik seperti (Schyns & Koop, 2010) (Jha, Boudreaux, & Banerjee, 2018) (Carreras & Bowler, 2018). (ii) Pemisahan modal sosial antara modal sosial individu dengan modal sosial kolektif yang melahirkan dampak yang berbeda seperti penelitian (Klingler Jonathan, 2014) (Birner & Wittmer, 2003). Menurut peneliti berbagai pendekatan yang digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya lebih mengarah

kepada dua aspek yaitu (i) hanya melihat adanya hubungan atau keterkaitan antara beberapa konsep yang dihubungkan dengan modal sosial. (ii) Pengelompokan antara modal sosial individu dengan modal sosial kolektif. Ada sebuah “celah kosong” yang belum dianalisis oleh beberapa peneliti terkait modal sosial yaitu bagaimana modal sosial tersebut dimanfaatkan oleh aktor yang mempengaruhi cara pandang masyarakat untuk menentukan pilihan.

Kategori yang kedua Penelitian terdahulu yang juga membahas modal sosial juga telah diteliti oleh peneliti lainya suda ada, akan tetapi memiliki fokus kajiannya masing-masing seperti (Putri, 2017) dalam jurnal antropologi budaya yang berjudul *Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014*. Mengatakan bahwa adanya pemanfaatan modal sosial menggunakan jaringan kekerabatan matrilineal oleh caleg perempuan pada pemilu 2014. Selanjutnya (Baharuddin & Purwaningsih, 2015) dalam Journal Of Governance And Public Policy yang membahas *Modalitas Calon Bupati Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan*. Terdapat 3 modal yang dominan dipakai dalam meraih dukungan suara yaitu modal politik, ekonomi, dan sosial. Dari kedua penelitian di atas pertama, (Putri, 2017) modal sosial dielaborasi dengan faktor kebudayaan dan garis keturunan yang dimiliki oleh calon tersebut. Terlihat ranah yang berbeda tentunya dari penelitian di atas, lebih kepada ranah keluarga dan unsur kebudayaan yang dicoba ditonjolkan dalam penelitian ini.

Ada sejumlah pembahasan yang cukup berbeda yang belum dibahas oleh beberapa penelitian lain yang luput diteliti yaitu, ketika modal sosial mencoba

masuk ke ranah kontestasi politik yang dibangun dan dimanfaatkan oleh seorang aktor dengan menggunakan habitus entah yang melekat pada diri individu maupun secara kolektif yang digunakan pada arena yang berbeda yaitu pada konteks pemilihan umum. Maka ini menjadi kajian yang menarik bagi peneliti dari sudut pandang tertentu modal sosial juga telah dipakai dalam ranah pemilihan umum di daerah. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jabarkan belum menjelaskan secara holistik jika modal sosial sudah mulai dimanfaatkan oleh aktor yang mereka coba masuk melalui norma-norma, kebiasaan yang ada pada diri mereka untuk meraih beberapa dukungan suara.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut menarik peneliti untuk menjadikan ini sebagai kajian penelitian. Permasalahan di atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimana bentuk-bentuk modal sosial yang dimiliki Mahyeldi Ansyarullah dan Hendri Septa serta pemanfaatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk modal sosial yang digunakan oleh Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018
2. Untuk menjelaskan pemanfaatan modal sosial oleh Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

- a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep modal sosial sebagai upaya dalam menggalang dukungan politik dalam kontestasi Pilkada.



- b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan modal sosial dalam tataran electoral proses.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang Modalitas politik dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan modal sosial di arena Pilkada.

